

Relasi Pemerintah Dan Masyarakat Kampung Dalam Pengembangan Kampung Wisata Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura Tahun 2022

Grein George Theodoron Wutoy*, Tri Nugroho

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

*Korespondensi Penulis: gwutoy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kampung wisata Berap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2022. Teori governance dan community development digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa data. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tahapan teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Berap pada tahun 2022 adalah Bentuk relasi pemerintah, swasta dan masyarakat output dan outcome yang dihasilkan dari relasi tersebut berupa perbaikan ekonomi, sosial bahkan politik dengan dikembangkannya Kampung Berap sebagai kampung wisata output yang telah dihasilkan adalah fasilitas-fasilitas pondok di objek wisata Kalibiru, untuk sampai pada outcome yaitu pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Kampung Berap. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pengembangan kampung Berap sebagai kampung wisata belum terlaksanakan dengan baik karena 2 faktor pertama objek wisata belum dikelola oleh pihak yang tepat dan kedua masyarakat masih sangat tertutup dan tidak percaya dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Kata kunci: Pemerintahan; Kampung Wisata; Kampung Wisata Berap.

Abstract

This study aims to identify the relationship between the government and the community in the development of the Berap tourism village and the factors that influence it in 2022. The theory of governance and community development is used as an analytical tool in analyzing the data. The research method used is qualitative, with data collection techniques of observation, in-depth interviews and documentation. Stages of data analysis data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the relationship between the government and the community in the development of the Berap tourism village in 2022 is a form of government, private and community relations. Politically, with the development of Berap Village as a tourist village output that has been produced is cottage facilities at the Kalibiru tourist attraction, to arrive at outcome, namely community empowerment for the development of Berap Village. The first factor is that the tourism object has not been managed by the right party and secondly, the community is still very closed and does not trust the government or the private sector.

Keywords: Governance, Tourism Village, Berap Tourism Village

Informasi Artikel:

Submit : 2022-06-06

Diterima : 2022-07-16

Diterbitkan: 2022-08-26

PENDAHULUAN

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu kabupaten di provinsi Papua, ibu kota kabupaten Jayapura adalah kota Sentani, Potensi yang dimiliki kabupaten Jayapura sangatlah banyak, mulai dari potensi ekonomi dikarenakan akses yang dimiliki oleh kabupaten Jayapura ke pusat provinsi Papua sangatlah mudah karena jaraknya yang sangat dekat dari pusat provinsi Papua, jika kabupaten lain di Papua membutuhkan akses melalui jalur laut maupun udara, kota sentani sebagai ibu kota kabupaten Jayapura langsung sudah terhubung dengan pusat provinsi Papua yaitu kota Jayapura.

Kalibiru pertama kali dibuka untuk ibadah HUT PI (Pekabaran Injil) pada tanggal 5 februari 2008, setelah itu menjadi salah satu potensi wisata yang sangat menjanjikan, kalibiru terletak di kampung Berap, distrik Nimbokrang, jika ditempuh dari pusat kabupaten Jayapura akan memakan waktu 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan bermotor, akses perjalanan menuju kalibiru juga adalah akses jalan trans papua antara kabupaten Jayapura dan kabupaten Sarmi, sehingga potensi pariwisata di kalibiru sangat menjanjikan karena bukan hanya wisatawan yang berasal dari kota Jayapura dan kabupaten Jayapura saja yang dapat berkunjung ke kalibiru, tetapi wisatawan dari kabupaten Sarmi. Selain itu wisata lain yang dapat ditawarkan di lokasi kalibiru kampung Berap adalah melihat aktivitas burung Cendrawasih yang merupakan burung asli Papua, karena kawasan kalibaru merupakan hutan lindung/konservasi pengembangbiakan burung-burung langka yang ada di Papua, bukan hanya itu tetapi potensi lain seperti kebun coklat, kacang-kacangan, dan juga perkebunan sayur turut melengkapi potensi wisata yang ada di kawasan kalibiru.

Pemerintah kampung dalam hal ini kepala kampung Berap dan juga Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pengembangan kalibiru bersama dengan gereja yang ada di kampung Berap telah banyak melakukan pembicaraan tentang pengembangan kali biru, tetapi masih terdapat permasalahan dikarenakan pengelolaan kalibiru dikelola oleh pemilik hak ulayat tanah di sekitar kalibiru yaitu Keluarga Buwe.

Pengembangan kalibiru juga mendapat bantuan berupa pondok-pondok dan toilet umum untuk wisatawan, bantuan tersebut berasal dari dinas pariwisata dan dinas pendapatan daerah (dispenda) dan ada para-para (tempat duduk) yang dibuat dari swadaya masyarakat (keluarga Buwe), meskipun pemerintah daerah sudah memberikan perhatian untuk pengembangan wisata kalibiru, tetapi karena sistem pengolahan yang masih dikuasai oleh pemilik hak ulayat sehingga pendapatan dari retribusi yang di dapat dari kalibiru langsung masuk ke dalam kas milik keluarga.Potensi yang dimiliki oleh kampung Berap untuk dapat dikembangkan menjadi kampung wisata jika dilihat sudah sangat bisa dijadikan kampung wisata yang dapat mensejahterakan masyarakat kampung Berap, tetapi dalam proses pengembangan desa atau kampung wisata masih terdapat beberapa masalah permasalahan baik dari segi infrastruktur sampai pada permasalahan perilaku masyarakat kampung Berap.

Pertama dari segi infrastruktur akses jalan saat memasuki kawasan kampung Berap, terdapat beberapa kerusakan yang sangat parah sehingga mengganggu akses masuk menuju lokasi wisata, kedua faktor kecemburuan masyarakat terhadap pemilik hak ulayat yaitu keluarga Buwe yang memonopoli objek wisata tersebut sehingga warga terpaksa pata satu objek wisata yaitu kali Biru mereka tidak melihat potensi lain seperti atraksi-atraksi kebudayaan yang bisa ditawarkan, ketiga adalah faktor dari manusia/masyarakat, di obyek wisata kalibiru masih ada beberapa gangguan wisatawan oleh penduduk sekitar yang sedang dipengaruhi minuman keras (mabuk) dan mengganggu wisatawan, keempat adalah kesadaran masyarakat tentang potensi wisata lain seperti atraksi kebudayaan belum dilihat sebagai potensi wisata di kampung Berap.

Beberapa penelitian tentang pengembangan kampung wisata sudah banyak dilakukan. Misalnya (Pujiningrum, 2018) yang mengkaji tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Tablanusu. Hasil penelitian mengungkapkan bentuk partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Pada tahap perencanaan masyarakat Tablanusu telah dapat berkomunikasi namun bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah dan

hanya satu arah. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pihak pemerintah.

Penelitian selanjutnya (Mangiri, 2020) yang mengkaji tentang Dampak Ekonomi dan Strategi Pengembangan Wisata Danau Sentasi di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis nilai ekonomi Danau Sentani menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah kunjungan wisata yaitu meliputi pendapatan, kebersihan dan pendidikan. Sedangkan yang berpengaruh signifikan negatif meliputi biaya perjalanan, jarak tempuh, dan usia. Kegiatan wisata di kawasan Danau Sentani menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp.875,166,460 juta per tahun. Kontribusi ekonomi yang dirasakan bagi masyarakat lokal masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan kebocoran ekonomi yang terjadi masih sangat besar terutama untuk transportasi dan konsumsi sehingga manfaat ekonomi yang dibawa wisatawan belum maksimal.

Selanjutnya (Mabel, 2022) yang mengkaji tentang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Heberima Kabupaten Jayawijaya Povinsi Papua dalam Upaya Pengembangan Kampung Agrowisata. Hasil pelaksanaan kegiatan iniberdampak positif dan pembelajaran yang baik bagi mahasiswa, institusi, mitrakerja dan pemerintah daerah setempat dalam pengolahan lahan tidak produktif menjadi lahan produktif dan meningkatkan pendapatan petani dengan menyelaraskan kegiatan pertanian dan pariwisata. Persentase capaian hasil kegiatan pengabdian adalah sebesar 80% petani selaku pemilik lahan sangat berantusias dalam pelaksanaan kegiatan PHP2D yang dimaksud.

Selanjutnya (Riesti Triyanti, Umi Muawanah, Nedah Kurniasari, 2020) yang mengkaji tentang Potensi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Adat Sebagai Kegiatan Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya dukung efektif kawasan Kampung Malaumkarta sebesar 57 pengunjung per hari, dengan nilai efek pengganda sebesar 1,14-1,64. Potensi kawasan pesisir Kampung Malaumkarta yang sangat beragam baik dari alam maupun budaya, dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung, tidak langsung, dan lanjutan sebesar Rp5.179.031.667 per tahun.

Selanjutnya (Suyatno, 2020) yang mengkaji tentang Sosialisasi Pengembangan Kampung Doyo Lama Sebagai Kawasan Wisata. Hasilnya adalah masyarakat kampung Doyo Lama menyadari bahwa kampung mereka memiliki potensi wisata yang besar yang jika dikelola dengan baik akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi mereka. Selain itu, Masyarakat kampung sudah mengetahui konsep kampung wisata, cara pengembangannya dan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.

Selanjutnya (Matheus Supriyanto Rumetna dan Tirsa Ninia Lina, 2020) yang mengkaji tentang Sistem Informasi Kampung Wisata Arborek Dengan Motede *Waterfall*. Hasilnya adalah Sistem informasi ini menghasilkan rancangan antarmuka sesuai dengan diagram usecase, Berawal dari menu Home, menu Profil yang di dalamnya terdapat submenu Struktur Organisasi dan Kependudukan, menu Fasilitas, menu Kearifan Lokal juga Budaya, menu Berita, menu Informasi yang di dalamnya terdapat tiga submenu yaitu Wisata, Homestay dan Transportasi, kemudian menu Galeri, menu Kontak serta yang terakhir terdapat pula menu Saran.

Selanjutnya (Wahyuni, 2018) yang mengkaji tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh Karang Taruna Putra Bukit Mandiri untuk menyadarkan masyarakat akan potensi desa Desa Nglanggeran. Akhirnya masyarakat sepakat menjadikan Nglanggeran sebagai desa wisata. Pengkapasitasan pengelola desa wisata dilakukan melalui pelatihan seputar pengelolaan desa wisata. Sebagai bentuk dukungan bagi pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Dinas Pariwisata dan

Kementerian Pariwisata aktif memberikan pelatihan dan pendampingan. Begitu juga dengan BUMN, pihak swasta maupun LSM.

Selanjutnya (Saputra, 2020) yang mengkaji tentang Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang berperan dalam pengembangan secara langsung adalah dinas pariwisata kota Yogyakarta, lurah Patehan, akademisi, pengelolakampung wisata, dan pelaku/penyedia jasa wisata. Pola kerjasama pihak pemerintah dengan masyarakat berupa pembinaan, dan kerjasama pihak akademisi dengan masyarakat berupa pengkajian.

Selanjutnya (Brahmanto, 2017) yang mengkaji tentang Strategi Pengembangan Kampung Batu Malakasari Sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus. Hasil penelitian menghasilkan beberapa rekomendasi terkait strategi pengembangan minat khusus di Kampung Batu Malakasari, yaitu: (1) Pengemasan daya tarik minat khusus; (2) Menghadirkan pendidikan berbasis geowisata (geowisata); (3) Memberikan pelatihan staf sebagai juru bahasa alam dan budaya; (5) Meningkatkan aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisata; (6) Melibatkan warga dalam pengelolaan wisata dengan konsep pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

Selanjutnya (Choresyo, 2017) yang mengkaji tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dago. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa aspek-aspek prasyarat partisipasi yaitu kesempatan, kemampuan dan keinginan telah terpenuhi. Dengan begitu, partisipasi dalam berbagai jenis dapat terwujud dari masyarakat. Melihat dari jenis partisipasi, warga telah melaksanakan kelima jenis partisipasi yang terdiri dari partisipasi pemikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang. Meskipun masih ada kekurangan dalam hal partisipasi uang, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kemampuan warga untuk memberikan partisipasi uang dan belum adanya sistem yang mengatur pendanaan program dari uang warga.

Berdasarkan uraian tentang penelitian sebelumnya baik yang berbicara tentang pengembangan desa wisata banyak pandangan dalam pengembangan ampung wisata sehingga peneliti dapat memberikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kebaharuan penelitian ini adalah yang pertama yaitu tentang penelitian di kampung Berap dalam pengembangan kampung Berap sebagai kampung wisata yang dikembangkan dari segi tatakelola pemerintahan atau bagaimana relasi pemerintah (pemerintahan kabupaten Jayapura dan pemerintah kampung Berap) dengan masyarakat kampung Berap sehingga permasalahan hak ulayat yang dihadapi dapat terselesaikan.

TINJAUAN TEORITIS: GOVERNANCE

Governance atau tata kelola pemerintahan pertama kali muncul di tahun 1989. Kemudian pada tahun yang sama World Bank, mendefinisikan *Governance* sebagai “*the exercise of political power to manage a nation’s affairs*” (pelaksana kekuasaan politik untuk mengelola urusan negara). Seiring dengan perkembangan waktu, istilah *governance* ini selalu mengalami perkembangan hingga saat ini. Glyn Davis dan Michael Keating menjelaskan lebih lanjut mengenai *governance* yang dipahami sebagai sesuatu yang luas dan memiliki konsep yang lebih fundamental apabila dibandingkan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah berkaitan dengan hubungan antar bagian dalam sistem politik sebagai sebuah kesatuan kelembagaan (Kurnia, 2018).

Governance atau tata kelola pemerintahan tiga komponen kelembagaan yang membangun konsep *governance* yaitu: pertama, *state* (pemerintah atau negara); kedua *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan terakhir adalah *society* (masyarakat). Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan berinterelasi. *State* berfungsi untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. *Private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapat. Sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Subhan, 2015).

Paradigma *governance* adalah tentang pentingnya interaksi aktor pemerintah dan nonpemerintah dipandu dan diarahkan dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Sebagaimana dijelaskan Vasudha Chhotray and Gerry Stoker bahwa: *Governance* adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana ada sejumlah aktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol resmi dapat mendikte hubungan antara aktor dan organisasi (Setiawan, 2018).

Tata kelola (*governance*) tetap penting dalam pengertian *meta-governance* yang tidak bias teknokratik-neoliberal. Tentu bukan “*governance without government*” melainkan “*government with governance*”. Pemerintah tanpa *governance*, atau interaksi dengan pihak luar, akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran. Sebaliknya “*governance without government*” akan membuat pemerintahan seperti dunia pasar, sehingga *government making* untuk mencapai tujuan negara sulit diwujudkan (Eko, 2021).

Governance adalah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan melibatkan Negara (pemerintah), sector privat maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Terdapat lima prosisi mengenai *governance* yaitu: *governance* merujuk kepada institusi dan aktor, *governance* mengidentifikasi adanya kabur batas-batas dan tanggungjawab mengatasi isu sosial dan isu ekonomi, *governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan hubungan antara institusi terlibat, *governance* adalah mengenai *self-governing* otonom dari aktor-aktor, *governance* menyadarkan untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya (Dewi, 2019).

Konsep *governance* tidak sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Subhan, 2015).

Dengan mendasarkan diri pada berbagai konsep dan perdebatan tentang makna *governance* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan proses *decision making* untuk mewujudkan tujuan bersama yang melibatkan banyak aktor secara kolektif. *Governance* dengan demikian menyangkut aspek proses dengan berbagai elemen dasar, demikian kesadaran menerapkan konsep *governance* dalam kerangka membangun kesejahteraan di negara manapun menjadi penting dan relevan (Yuwono, 2014).

Pada tingkat yang paling dasar, tata kelola mencakup pada pengelolaan jalannya peristiwa dalam sistem sosial, baik sistem yang disusun dalam kerangka organisasi, sektoral atau yang lebih luas. Dalam hal ini, tata kelola adalah sistem mencakup struktur, interaksi internal dan eksternal, serta cara pengambilan keputusan dan perilaku-perilaku lain yang relevan, *governance* berisi tentang aturan-aturan pengambilan keputusan kolektif dilingkungan dengan keberadaan sejumlah aktor atau organisasi dan ketidakadaan sistem kontrol formal yang dapat menentukan persyaratan hubungan antara aktor organisasi ini (Firdaus, 2021).

Governance mengedepankan kepada hasil (outcomes) yang secara paralel juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah tradisional. *Governance* tetap berhubungan dengan penciptaan kondisi tertib kekuasaan dan aksi kolektif yang karenanya outputnya tidak berbeda dari *government* namun substansinya berbeda yaitu dalam masalah prosesnya saja (Setiabudi, 2015).

Governance adalah percampuran antara negara, swasta dan *civil society*. Percampuran ini dilihat sebagai interaksi politik antaraktor. Tradisi berfikir ini setidaknya banyak diilhami oleh konsep “elit” dan “aktor”. Tidak heran, pada paham seperti ini *governance* hanya dilihat sebagai arena perebutan kuasa bagi berbagai aktor. Aktor yang kuat akan lebih dominan. Begitu lebih dominan dia akan lebih banyak menguasai arena dalam *governance*, yang wujudnya dapat dilihat dari kebijakan (Habibah, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi tentang *governance* maka penulis mengambil kesimpulan *Governance* atau tata kelola pemerintahan tiga komponen kelembagaan yang membangun konsep *governance* yaitu: *state, private sector* dan *society*. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik maka konsep yang benar ketiga komponen yaitu negara (pemerintah), sektor swasta dan masyarakat mampu berelasi dengan baik untuk kepentingan Bersama. Dalam pandangan tentang *governance* relasi antar actor diharapkan dapat menghasilkan *output* dan *outcome* masih masyarakat, baik berupa perbaikan sosial, ekonomi dan politik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pengertian *governance* ini yang coba peneliti sajikan melalui pembahasan untuk menunjukkan pengembangan sektor pariwisata di kampung Berap, melalui relasi pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga diharapkan masyarakat dalam menikmati masih dari pengembangan kampung Berap menjadi kampung wisata yang berdampak pada kemajuan kondisi sosail, ekonomi bahkan politik dalam kehidupan masyarakat di kampung Berap.

DESA/KAMPUNG WISATA

Pengertian kampung wisata/ desa wisata menurut Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 6 tahun 2010 desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata/kampung wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata (Alfiah, 2019).

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Desa wisata sebagai suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya (Wahyuni, 2018).

Desa wisata merupakan potensi yang memiliki daya tarik wisatawan. Lebih dari itu, desa mampu menyuguhkan tradisi, budaya, lingkungan, dan aktivitas yang belum tentu dimiliki desa lain. Artinya, sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat setidaknya memberi harapan bahwa aspek kepariwisataan yang dibangun dan dikembangkan tidak lepas dari pola kehidupan mereka. Bagaimanapun tidak hanya manusia, namun hewan dan tumbuhan juga membutuhkan tempat tinggal yang layak. Menjaga alam dan merawat dengan baik juga menjaga kelangsungan hidup seluruh ekosistem. Maka, harus ada kesepakatan awal di antara masyarakat desa dalam rangka mengembangkan potensi alam. Jika hal ini sudah berjalan dengan mudah pemerintah dan masyarakat akan mengembangkan desa wisata (Syah, 2017).

Desa wisata adalah sejauh mana kegiatan desa wisata mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokalnya. Pariwisata akan dianggap gagal jika manfaat ekonomi dari kegiatan wisata justru dinikmati oleh orang-orang luar, pemodal-pemodal besar, sedangkan masyarakat lokalnya justru termarginalkan secara ekonomi (Hermawan, 2016).

Berdasarkan pengertian-pengertian desa wisata yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang mampu menawarkan daya tarik bagi wisatawan untuk datang mengunjungi desa tersebut. Daya tarik yang dimaksud pertama, berupa adat atau budaya yang dituangkan dalam keseharian misalnya, budaya keseharian, tari-tarian, bangunan rumah atau arsitektur lokal yang dimiliki oleh masyarakat di desa wisata tersebut. Kedua terdapat keindahan alam seperti hutan, sungai atau danau, gunung atau

lembah yang dijaga kelestariannya sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung.

PENGEMBANGAN KAMPUNG/DESA WISATA

Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor: pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan (Muhamad, 2017).

Pariwisata berbasis masyarakat atau yang sering disebut sebagai *Community Based Tourism* (CBT) merupakan bentuk pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya untuk membantu wisatawan agar dapat memahami dan mempelajari tata cara hidup masyarakat lokal. Pendirian desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan CBT. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan kesejahteraan, dimana hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan (Wahyuning, 2018).

Konsep pengembangan desa wisata, Pearce yang dikutip oleh mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Hery, 2013).

Pengembangan desa wisata selain menimbulkan dampak positif, pengembangan desa wisata yang kurang terkontrol juga bisa memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan pedesaan. Dampak tersebut antara lain adalah meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas untuk menunjang kegiatan desa wisata (Page and Gertz) dalam (Nyoman, 2017), kriteria dasar pengembangan desa wisata antara lain:

- a. Keberadaan obyek dan daya tarik: desa memiliki obyek daerah tujuan wisata, paling sedikit berdekatan dengan suatu obyek daerah tujuan wisata yang sudah terkenal, sehingga dapat dikaitkan dengan paket perjalanan yang sudah ada
- b. Memiliki akses fisik dan akses pasar.
- c. Memiliki potensi kemitraan.
- d. Adanya motivasi dan antusiasme masyarakat.
- e. Tersedianya fasilitas umum minimal.

Pengembangan desa wisata dapat diartikan sebagai proses menjadikan desa sebagai objek wisata, dimana desa meliputi sumber daya alam, masyarakat, budaya dan segala potensi yang ada didalamnya yang berkaitan satu dengan lainnya. Sehingga perkembangan desa wisata secara partisipatif merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, mengingat elemen yang ada di desa banyak dan semua itu saling terkait satu sama lainnya (Hendriyana, 2019).

Pengembangan desa wisata dapat dilakukan jika kapasitas atau kompetensi individu atau kelompok baik, Tingkatan kompetensi atau kapasitas individu bisa diukur melalui beberapa indikator yaitu *Knowledge* (meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pengetahuan kerja), *Ability* (perencanaan, organisasi, pelaksanaan, evaluasi, kerja sama, mengatasi konflik) dan *Interest* (orientasi sikap, percaya diri, tanggung jawab, norma dan etika) (Noho, 2014).

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang pengembangan desa wisata yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengembangan desa wisata adalah suatu cara untuk mengembangkan pariwisata yang dilakukan baik oleh pemerintah (pusat, provinsi,

kabupaten dan kota sampai desa), bersama dengan masyarakat dan pihak ketiga (swasta atau LSM), yang di dorong karena beberapa faktor seperti potensi alam dan budaya yang ada di desa, kedua lingkungan yang belum tercemar, dan ketiga untuk mempercepat pembangunan desa.

Pengembangan desa wisata harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat desa, sehingga kemampuan masyarakat secara individu maupun kelompok atau organisasi harus bisa dilakukan, kapasitas individu yang dimaksud meliputi pengetahuan, perencanaan dan orientasi sikap untuk terus berkembang. Sedangkan peningkatan kapasitas kelompok atau organisasi dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan mengambil keputusan, kemampuan untuk menjalankan kebijakan, dan kemampuan untuk memberikan layanan yang baik. Selain itu untuk pengembangan desa wisata perlu juga memperhatikan aspek lain seperti tipologi desa wisata yaitu adat atau budaya, lingkungan dan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga potensi wisata di desa dapat optimal.

Berdasarkan beberapa definisi tentang pengembangan kampung/desa wisata maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengembangan merupakan bagian dari pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal, selain itu untuk optionalnya kampung wisata maka beberapa kriteria dasar perlu di kelola seperti keberadaan objek dan daya tarik wisata, akses fisik dan pasar, potensi kemitraan, motivasi dan antusiasme masyarakat dan fasilitas umum minimal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan jumlah informan sebanyak 10 orang. Lokasi penelitian adalah kampung Berap, distrik Nimbokrang, kabupaten Jayapura, objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengembangan kampung wisata Berap. Teknik pengumpulan data dengan Observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Dan Tarik Yang Dimiliki Dimiliki Oleh Kampung Berap

Dalam pengembangan objek dan tarik yang dimiliki dimiliki oleh kampung Berap, pemerintah (pemerintah daerah dan kampung), sektor swasta dan masyarakat telah menyadari potensi pengembangan Kalibiru dan daya tarik lainnya lainnya, pemerintah telah berkali-kali berusaha untuk mengembangkan kalibiru dengan membantu masyarakat dalam membuat gazebo/pondok untuk wisatawan beristirahat serta menikmati keindahan alam di kalibiru tetapi tidak sampai disitu pemerintah juga berencana untuk pengembangan agrowisata karena kontur tanah yang baik dan subur. Selain itu perlu menyadarkan masyarakat bahwa aliran air kalibiru melintasi seluruh kampung Berap, pemerintah kampung sebagai juga secara lisan menyampaikan bahwa setiap Keret (Marga) mempunyai potensi sangat bisa dikembangkan, yaitu:

1. Keret Kasse dan Tarko mempunyai kepala air (mata air kalibiru) yang sangat bisa di kembangkan untuk usaha air minum atau air bersih di kabupaten Jayapura.
2. Keret Buwe mempunyai tempat wisata kalibiru yang sudah mulai berkembang dan banyak dikunjungi oleh wisatawan.
3. Keret Yosua mempunyai objek wisata Tugu injil yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata religi serta sejarah bagi wisatawan yang datang untuk berkunjung.
4. Keret Manggo memiliki 26 telagah yang terdapat di lembah yang masing-masing telagah memiliki potensi untuk budidaya ikan dan sejenisnya, bahkan terdapat telagah yang dihuni oleh buaya.

Dari potensi-potensi di atas, penulis selama melakukan observasi selama penelitian, objek wisata kalibiru serta beberapa kali berjalan-jalan di kampung Berap secara mandiri dan bersama kepala desa, ada beberapa rekomendasi potensi lain yang bisa dikembangkan lagi, pertama melihat

animo masyarakat yang berkunjung ke kalibiru, maka masyarakat kampung bisa memanfaatkan situasi pada hari-hari tertentu untuk membuat atraksi di objek wisata kalibiru misalnya Yosim Pancar (Yospan), kedua objek wisata kalibiru merupakan bagian kecil dari kalibiru yang melintasi seluruh kampung, sehingga bisa dijadikan wisata susur sungai melintasi kampung Berap dengan cara menyewakan ban karet, atau pun rakit yang sangat bisa di awasi oleh masyarakat di kampung Berap.

Ketiga mengikuti tren masa kini adalah wisatawan selalu ingin mengabadikan momen yang ada masyarakat di kampung Berap terutama para pemuda di kampung Berap bisa dilatih untuk menjadi fotografer di objek wisata tersebut, dan keempat lokasi kalibiru sangat berpotensi dikelola menjadi tempat camping baik bagi wisatawan biasa, camping untuk remaja dan pemuda gereja atau kegiatan-kegiatan kampus seperti malam keakrapan (Makrap) karena di Jayapura terdapat banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Dari aspek pertama pengembangan kampung wisata yaitu objek dan daya tarik kampung Berap, memang terlihat bahwa relasi *governance* antara pemerintah, sector swasta dan masyarakat belum terlalu terlihat kerja sama yang baik, karena potensi-potensi tersebut belum bisa dikembangkan secara menyeluruh, dari pembahasan-pembahasan setelah penulis mengetahui keadaan di kampung Berap, maka penulis mendapat beberapa kendala, yaitu:

1. Pertama masalah keamanan bagi wisatawan, karena penyakit masyarakat seperti meminum minuman kere (miras) dan ketika mabuk mengganggu wisatawan.
1. Masalah kebersihan di objek wisata kalibiru, baik di lokasi objek wisata maupun sepanjang bantaran sungai.
2. Kecemburuan sosial masyarakat kepada keret Buwe yang membuat mereka tidak bisa melihat potesi lainnya.

Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan Akses Fisik Dan Akses Pasar Dalam Pengembangan Kampung Berap

Kriteria dasar yang kedua yaitu akses fisik dan akses pasar dalam pengembangan kampung Berap sebagai kampung wisata, akses fisik atau jalan menuju kampung Berap, sudah terhubung, dan terletak diantara dua kabupaten yaitu kabupaten Jayapura dan kabupaten Sarmi, sehingga jalan menuju kalibiru sudah bisa dilalui sampai ke objek wisata tersebut. Tetapi selama observasi mulai dari bulan mei sampai juni 2021 akses fisik setelah masuk ke kampung Berap, masih banyak yang berlubang sehingga membuat perjalanan menuju kampung Berap tidak terlalu nyaman dilakui, selain itu kampung Berap memiliki jarak yang paling jauh dari pusat distrik Nimbokrang dibandingkan 4 kampung lainnya.

Dari hasil observasi serta wawancara yang penulis lakukan sejak bulan mei-juni 2021 dan bulan desember 2021, penulis melihat bawah tatakelola dalam pengerjaan akses fisik secara umum sangat baik dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat. Pertama pemerintah distrik serta kampung membangun akses jalan langsung dari pusat distrik ke kampung Berap, sehingga tidak perlu memutar dan makan waktu yang banyak untuk menuju distrik dari kampung Berap ke pusat distrik atau sebaliknya.

Kedua jalan masuk menuju kampung Berap, ketika penulis kembali untuk mengambil saja penelitian yang kurang pada bulan desember akses jalan sedang di kerjakan pengerjaan jalan (Cor), sedang dikerjakan oleh CV.Adikarya Tanrisau sepanjang 3km dan direncanakan dikerjakan sepanjang 5km untuk sampai pada kampung Berap. Untuk proses pengaman pekerja yang mmengerjakan proyek jalan tersebut, inisitif pemerintah kampung untuk melibatkan masyarakat sebagai petugas pengaman selama proses pengerjaan jalan tersebut. Dalam pembangunan akses fisik terlihat tatakelola pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat terlihat bahu-membahu dalam mengerjakan akses fisik untuk mendukung pengembangan kampung Berap sebagai kampung wisata.

Pengembangan kampung wisata melalui akses fisik dan akses pasar, memiliki kendala dalam akses pasar, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan bahwa akses pasar bukan terbatas dalam arti pasar sebagai fisik tetapi lebih luas yaitu cara promosi agar kalibiru sebagai salah satu objek wisata bisa dikenal masyarakat luas, kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Tidak ada pasar dikampung Berap, sehingga masyarakat hanya terbatas berjualan diobjek wisata kalibiru dan tempat untuk menjual kerajinan, makan dan minuman, serta hasil berkebun sangat terbatas.
2. Promosi kalibiru sebagai destinasi wisata setelah penulis menelusuri melalui Webside pemerintah, serta melalui blog-blog milik pribadi atau kelompok, yang sangat terbatas.
3. Selain itu kita perlu mengakui bahwa harga yang harus dibayar jika wisatawan dari luar papua tertarik untuk berkunjung biaya yang dikeluarkan untuk akomodasi sangat tinggi sehingga kesiapan tempat untuk tinggal bagi wisatawan yang mau berkunjung juga belum tersedia.

Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan Potensi Kemitraan Dalam Pengembangan Kampung Berap

Kriteria dasar pengembangan kampung wisata yang selanjutnya adalah memiliki potensi kemitraan, potensi kemitraan yang pertama yaitu pemerintah dan pemilik hak ulayat, antara dinas pendapatan daerah, pemerintah kampung Berap, dan pemilik hak ulayat dalam retribusi di objek wisata kalibiru, selain itu dari dinas PUPR mendukung dengan membuat sanitasi layak bagi masyarakat di kampung Berap. Selain itu dari kementerian kehutanan sedang mengadakan pengerjaan hutan raya dengan beragam flora dan fauna dari hutan sekitar kampung Berap, selain itu dari dinas pariwisata sedang berusaha bekerja sama dengan pemerintah kampung untuk membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), dan dari pihak WWF juga mendukung pengembangan kampung Berap sebagai kampung Wisata. Kendala-kendala dalam potensi kemitraan yang peneliti amati selama observasi dan wawancara, yaitu:

1. Meskipun retribusi telah dibagi-bagi untuk pemilik hak ulayat 60% dari hasil, serta pemerintah kampung dan dinas pendapatan masing masing mendapat 20%. Tetapi kenyataannya masih 100% diambil oleh pemilik ulayat.
2. Kendala pembentukan Pokdarwis masih terkendala karena tidak ada antusiasme yang menyeluruh dari masyarakat kampung Berap.

Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan Motivasi Dan Antusiasme Masyarakat, Serta Fasilitas Umum Minimal Dalam Pengembangan Kampung Berap

Kriteria dasar pengembangan kampung wisata berikutnya adalah motivasi dan antusiasme masyarakat, serta fasilitas umum minimal yang tersedia, penulis akan lansung memaparkan kendala-kendala dalam kriteria ini, karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam 2 hal tersebut masih belum bisa berkembang, kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Motivasi dan antusiasme masyarakat belum bisa berkembang dikarenakan kecemburuan sosial yang tinggi dari masyarakat kepada keluarga Buwe sebagai pemilik hak ulayat karena menguasai objek wisata kalibiru.
2. Fasilitas MCK masih belum memenuhi standar untuk tempat wisata, tetapi cukup untuk kebutuhan MCK pengunjung.
3. Fasilitas persampahan merupakan kendala yang besar karena sampah di kelolah oleh pengelola secara tradisional yaitu dengan cara dibakar ataupun ditimbung.

Tentunya aspek *governance* dalam hal ini sangat belum bisa terlihat, usaha pemerintah daerah maupun pemerintah kampung serta pihak swasta sebagai pengembang masih terbentur dengan

ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah daerah dan pihak swasta sebagai pengembang, kemudian pemerintah kampung terbentur dengan silsilah keluarga yang ada di kampung Berap. Permasalahan yang selanjutnya pengembangan kampung wisata merupakan tanggung jawab multisektoral dan berkaitan dengan wisata sehingga dinas pariwisata harus memegang kendali utama, tetapi pada kenyataannya tidak seperti ini, pengelolaan objek wisata kalibiru dikelola oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Jayapura, karena kepala dinas mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan keluarga Buwe sebagai pemilik hak ulayat.

KESIMPULAN

Bentuk relasi pemerintah, swasta dan masyarakat *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari relasi tersebut berupa perbaikan ekonomi, sosial bahkan politik dengan dikembangkannya Kampung Berap sebagai kampung wisata *output* yang telah dihasilkan adalah fasilitas-fasilitas pondok di objek wisata Kalibiru, untuk sampai pada *outcome* yaitu pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Kampung Berap masih terkendala dengan berbagai masalah yang meliputi kecemburuan masyarakat akan hak ulayat setiat Keret/Marga di Kampung Berap. Relasi masyarakat dengan pemerintah daerah juga bersifat kekerabatan sehingga pemerintah terbentur dengan adat-istiadat yang berlaku. Relasi pemerintah dan swasta dalam proses pendanaan yang promosi sudah berjalan dengan baik tetapi masih selalu berbenturan dengan ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak swasta yang ingin mengembangkan kawasan objek wisata di Kampung Berap.

Pengembangan kampung wisata berdasarkan objek dan daya tarik wisata kampung Berap, masih terfokus pada satu objek wisata yaitu kalibiru dan terkendala perkembangan dan pengolahannya masih terikat dengan hak ulayat sehingga belum bisa dikelola dengan baik, potensi objek dan daya dari lain yang belum dikelola yaitu Tugu Injil, 26 Telaga serta beberapa potensi wisata lainnya. Dalam pengembangan akses fisik di kampung Berap sudah sangat layak dalam mendukung kampung Berap sebagai kampung wisata karena akses untuk sampai ke kecamatan sudah ada dan akses jalan masuk yang sebelumnya sangat berlubang telah diperbaiki, kendalanya adalah pada akses pasar untuk masyarakat menjual hasil bumi yang belum tersedia di kampung tersebut.

Potensi kemitraan dalam pengembangan kampung Berap sebagai kampung wisata belum berjalan secara baik, persoalan masyarakat yang tertutup dan tidak mudah percaya terhadap pemerintah dan pihak swasta dalam pengembangan potensi wisata, selain itu dalam pengelolaan tempat wisata dikelola oleh dinas pendapatan daerah yang seharusnya ada dibawah dinas pariwisata, hal tersebut terjadi karena antara pemilik hak ulayat dan kepala dinas pendataan daerah memiliki hubungan kekeluargaan.

Motivasi dan antusiasmen masyarakat di kampung Berap merupakan masalah yang sangat mendasar dan membuat potensi-potensi wisata belum berkembang. Faktor kecemburuan sosial terhadap pemilik hak ulayat membuat masyarakat tidak memiliki antusiasme dalam mengembangkan potensi wisata lainnya yang terdapat di kampung Berap. Fasilitas umum minimal di objek wisata kalibiru sudah tersedia, tetapi tetapi belum memenuhi standar/kriteria fasilitas umum untuk (MCK) bagi pengunjung di objek wisata kalibiru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk relasi pemerintah, masyarakat dan swasta melalui pengembangan berdasarkan keberadaan objek dan daya tarik wisata, akses fisik dan akses pasar, potensi kemitraan, motivasi dan antusiasmen masyarakat dan fasilitas umum minimal yang dimiliki oleh Kampung Berap agar menjadi kampung wisata belum terlaksana dengan baik karena 2 faktor, pertama objek wisata belum dikelola oleh pihak yang tepat dan kedua masyarakat masih sangat tertutup dan tidak percaya dengan pihak pemerintah maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiah, S. (2019). Manajemen Pengolahan Desa Wisata Pada Desa Cimanggu, Kecamatan

- Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Padam Curug Paok Dan Bukti Pasir Jaka). *Jurnal Abdi Masyarakat*, 24.
- Brahmanto, E. (2017). Strategi Pengembangan Kampung Batu Malakasari Sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus. *Jurnal Media Wisata*, Volume 15,.
- Choesy, B. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dago Pojok. *Jurnal Unpat*, Volumen 4.
- Dewi, Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Sudi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmia Dinamika Sosial*, Volume 3 N.
- Eko, S. (2021). Government Making: Membuat Uang Ilmu Pemerintahan. *Governabilitas*, Volume 2 N.
- Firdaus, E. (2021). *Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil*.
- Habibah, U. (2021). Relasi Aktor Governance Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, Volume 10.
- Hendriyana, D. (2019). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pariwisata*, Volume 6 N.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, Volume 3 N.
- Hery, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pariwisata Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jailuwih Tabanan, Bali. *Kawistara*, Volume 3 N.
- Kurnia, R. (2018). Inovasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa : Electronic Village Budgeting (E-Village Budgeting) Untuk Menciptakan Good Governance Di Kabupaten Banyuwangi. *Journal Of Politic And Government Studies*, 1–15.
- Mabel, R. (2022). No Title Potensi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Adat Sebagai Kegiatan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)*, Volume 2 N.
- Mangiri, D. (2020). Dampak Ekonomi Dan Strategi Pengembangan Wisata Danau Sentasi Di Kabupaten Jayapura. *Journal Of Regional And Rural Development Planning*, 31–43.
- Matheus Supriyanto Rumetna dan Tirsia Ninia Lina. (2020). Sistem Informasi Kampung Wisata Arborek dengan Metode Waterfall. *Information System For Educators And Professionals*, Vol. 5, No.
- Muhamad. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasi Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 23.
- Noho, Y. (2014). Kapasitas Pengelolaan Desa Wisata Religius Bongo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Nasional Pariwisata*, Volume 6 N.
- Nyoman, I. (2017). Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Analisis Pariwisata*, Volume 17.
- Pujiningrum, I. (2018). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Tablanusu. *JUMPA*, Volume 05,.
- Riesti Triyanti, Umi Muawanah, Nedah Kurniasari, P. A. S. dan F. (2020). Potensi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Adat sebagai Kegiatan Ekonomi Kreatif Di Kampung Malaumkarta, Papua Barat. *J. Sosek KP*, Vol. 15 No. 1 Juni 2020: 93-105.
- Saputra, D. (2020). Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat . *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 13,.
- Setiabudi, D. (2015). Pelaksanaan Good Public Governance Pada Lembaga Negara Dalam Kajian Politik. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, Volume 39.
- Setiawan, T. (2018). Dilema Public Sosial Private Partneship (PSPP) Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik. *Journal Of Public Adminisration And Local Governance*, Volume 2 N.
- Subhan, A. (2015). Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsis Jambi Ditinjau Dari

- Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Voluem 1 N*.
- Suyatno. (2020). Sosialisasi Pengembangan Kampung Doyo Lama Sebagai Kawasan Wisata. *ABDIMAS DINAMIS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 73–77*.
- Syah, F. (2017). *Strategi Mengembangkan Desa Wisata*. Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 9 N*.
- Wahyuning, N. (2018). Potensi Pengembangan Desa Kliwonan Sebagai Desa Wisaa Batik Di Kabupaten Sragen. *Journanl Of Regional And Rual Development Planing, 76–80*.
- Yuwono, T. (2014). Penegakan Hukum Sebagai Salah Satu Faktor Utama Keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan Jokowi-Rudy Di Kota Surakarta. *Ejournal.Undip, 289–297*.